

Proyek Jalan Simbuang – Mappak Tana Toraja Dibatalkan, IPPEMSI Cari PJ Gubernur Sulsel



Sumber gambar:

<https://toraja.tribunnews.com/2024/04/04/proyek-jalan-simbuang-mappak-tana-toraja-dibatalkan-ippemsi-cari-pj-gubernur-sulsel>

Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Simbuang-Mappak (IPPEMSI) Makassar, menggelar demonstrasi di kantor Gubernur Sulsel dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (2/4/2024).

Kordinator lapangan unjuk rasa, Lukas Luis, mengatakan aksi yang mereka lakukan karena kecewa dengan dibatalkannya proyek pembangunan jalan Kecamatan Simbuang-Mappak, Kabupaten Tana Toraja, Sulsel.

"Tujuan dari pada aksi tersebut ialah meminta pertanggungjawaban PJ Gubernur Sulawesi Selatan, karena telah menarik anggaran yang telah disepakati Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan masyarakat Simbuang-Mappak," ucapnya, Kamis (4/4/2024).

Lukas Luis, mengatakan bahwa pada bulan Mei 2023, saat Andi Sudirman Sulaiman masih menjabat Gubernur Sulawesi Selatan, dianggarkan dana Rp17 miliar untuk ruas Masuppu, Pasobbo, Matangli.

"Kenapa dibatalkan, padahal ini merupakan perjuangan IPPEMSI sebelumnya, bahkan sudah mulai dikerjakan. Namun saat Bahtiar menjabat Pj Gubernur Sulsel, dia menarik anggaran itu secara tiba-tiba tanpa melihat prosedur dan hukum yang berlaku," tuturnya.

Ia juga mengatakan bahwa IPPEMSI menyesalkan sikap dari DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang acuh melihat peristiwa ini, dan tidak menggunakan fungsinya sebagai lembaga pengawasan. "Sebelumnya kami telah meminta Pj Gubernur Sulawesi Selatan untuk bertemu dengan kami, mengajak beliau untuk mendiskusikan persoalan tersebut dengan baik-baik, namun selang beberapa waktu tak ada respon yang beliau berikan," ujarnya.

"Hal itu yang kemudian membawa IPPEMSI sampai disini, martabat dan harga diri kami sebagai masyarakat diinjak. Sehingga tanpa intruksi dan intervensi dari siapapun kami berjuang untuk mengambil kembali hak kami sebagai masyarakat Simbuang-Mappak," tambah Lukas. Diketahui, jalan poros Kecamatan Simbuang-Mappak, Kabupaten Tana Toraja menghubungkan dengan jalan poros ke Kabupaten Mamasa, Sulbar. Jalan ini tak pernah tersentuh aspal.

Selain itu, Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin, meresmikan berbagai proyek pembangunan di Stadion H A Wana bertepatan perayaan Hari Jadi Kabupaten Soppeng ke-763 Tahun. Adapun proyek itu antara lain peningkatan jaringan irigasi D.I Lajaroko, penataan KWA Lejja Tahap II, pembangunan Puskesmas Baringeng, Preservasi Jalan Long Segment (Ruas Pancie-Transmigrasi), pembangunan anjungan Gasis (Anjungan I Mangkawani) dan pembangunan Jembatan Lampae.

Bahtiar Baharuddin dalam rilisnya diterima di Makassar, Rabu, mengatakan pentingnya memanfaatkan nilai-nilai historis dan budaya Soppeng sebagai pondasi untuk memajukan ekonomi lokal. Ia menilai, selama ini Kabupaten Soppeng telah seoptimal mungkin dengan berbagai cara tetap bisa tumbuh dan berkembang sebagai daerah yang maju dan makmur di Sulsel, termasuk saat pandemi COVID-19.

Pj Gubernur Bahtiar juga mengapresiasi ketahanan dalam menghadapi berbagai tantangan dan kemajuan Soppeng, meski tidak memiliki pertambangan. Tetapi pertumbuhannya lebih baik dan masyarakat bahagia. "Ini yang harus dipelajari. Rupanya daerah maju itu tidak harus punya tambang," ujarnya.

Bahtiar juga mengungkapkan, walaupun ia telah membagikan benih ikan nila secara gratis, tetapi ini telah lebih dulu dilakukan oleh Bupati Soppeng, Kaswadi Razak. "Ternyata ini sudah sudah lama dilakukan oleh Bupati Soppeng, di mana setiap orang Soppeng boleh mendapat benih ikan secara gratis," ujarnya.

Dirjen Politik dan Pemerintah Umum Kemendagri ini juga mengapresiasi Kabupaten Soppeng yang mengembangkan berbagai macam jenis tanaman hortikultura. Seperti Cabai Tampaning yang memiliki banyak Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Fitria Nabila

buah dengan umur pohon dua kali lipat dari cabai biasa. “Kenapa hortikultura? Karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi,” ungkapnya.

Ia juga meminta masyarakat memanfaatkan KUR yang ada, dan memanfaatkan alamnya dengan baik. Gubernur kemudian memberikan 50.000 bibit untuk warga Soppeng, berupa nangka dan sukun.

Sumber Berita :

1. <https://toraja.tribunnews.com/2024/04/04/proyek-jalan-simbuang-mappak-tana-toraja-dibatalkan-ippemsi-cari-pj-gubernur-sulsel> 4 April 2024.
2. <https://makassar.antaranews.com/berita/535785/pj-gubernur-sulsel-resmikan-sejumlah-proyek-di-hari-jadi-soppeng> 24 April 2024.

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 49 yang menyatakan:
 - a. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
 - d. Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
 - e. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
 - f. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

- g. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 65 huruf d. yang menyatakan:
Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;